



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Penetapan Tsk Baru Tunggu Hasil Sidang

Dugaan Korupsi Setwan Selama

BENGKULU - Tampaknya masih butuh proses panjang akan kemungkinan penambahan atau penetapan tersangka baru dugaan korupsi anggaran BBM dan Pemeliharaan Randis Sekretariat DPRD (Setwan) Selama tahun 2017. Penyidik Polda Bengkulu masih menunggu putusan PN Tipikor Bengkulu terhadap dua tersangka, Samsul Asri mantan Bendahara Setwan dan PPTK Setwan, Fery Lastoni. Sementara sidang terhadap kedua tersangka belum dimulai, karena JPU Kejari Seluma masih mempersiapkan dakwaan yang akan disampaikan di persidangan nanti.

Diakui Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Sudarno, S.Sos, MH, penyidik baru akan melanjutkan (pengusutan Jilid II) dugaan korupsi BBM dan pemeliharaan randis itu setelah ada putusan terhadap dua tersangka itu. "Kita tetap komitmen mengusut perkara ini tanpa tebang pilih. Tapi untuk melanjutkannya kita masih akan menunggu putusan PN Bengkulu. Apakah ada petunjuk yang dapat digunakan atau tidak yang mengarah kepada keterlibatan pihak lainnya," terang Sudarno.

Jika dari hakim didapatkan petunjuk atau bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, maka penyidik Dit Reskrimsus Polda akan langsung menyika-

pi. "Jadi ya kita tunggu dulu," kata Sudarno.

Walaupun informasi yang beredar menyebutkan ada 9 anggota DPRD Seluma periode 2014-2019 dan dua pejabat di Setwan terlibat dan menikmati uang hasil penyelewengan itu seharusnya juga ditetapkan sebagai tersangka, ditegaskan Sudarno penyidik tak bisa hanya berpatokan pada satu keterangan saja. Harus ada bukti-bukti yang kuat yang mengindikasikan adanya keterlibatan pihak lainnya. "Dari pemeriksaan sebelumnya, dua tersangka ini (bendahara dan PPTK) yang dapat kita tetapkan. Untuk terduga lainnya belum dapat kita proses, karena memang belum cukup

bukti," jelas Sudarno.

Jadi kata Sudarno, tunggu dan lihat petunjuk yang didapat hakim dalam persidangan nanti. "Yang jelas kita siap memproses jika dari putusan yang disampaikan hakim, ditemukan bukti keterlibatan pihak lain," sampainya.

Terpisah, Kuasa Hukum Fery Lastoni, yakni Made Sukiade, SH menyampaikan kliennya akan buka-bukaan saat persidangan nanti. Semua akan diberkan kemana saja aliran dana BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas Setwan Selama tahun 2017 tersebut. "Yang jelas kita akan buka-bukaan dalam persidangan nanti. Silahkan hakim menyimpulkan,

namun saya harap semua komitmen dan tegas. Jangan tebang pilih, semua yang terlibat harus bertanggung jawab dan diproses hukum," tukasnya.

Untuk diketahui dari audit BPK RI tahun 2018 untuk realisasi anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di DPRD Seluma tahun 2017, dari total belanja BBM Rp 1,1 miliar, sebesar Rp 927 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada bukti struk pembelian BBM. Begitupun belanja pemeliharaan kendaraan dinas, dari total anggaran Rp 899 juta terdapat Rp 233 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Sekretariat DPRD Seluma. (aba)